

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi pada Destinasi Wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung)

Implementation of Ecotourism Development Policy in Improving the Regional Economy (Study at the Balong Kawuk Tourism Destination, Sumberejo Kulon Village, Tulungagung Regency)

Zulfaisya Nurhalimah¹, Satria Iman Yanottama²

¹Universitas Tulungagung / Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Indonesia

² Universitas Kadiri / Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Indonesia

zulfaisyanurhalimahunita@gmail.com

satriayanottama@gmail.com

ABSTRAK

Didalam penelitian analisis ini pengarang mementingkan terdapat 3 pandangan atau bagian penting implementasi terdapat didalam kebijaksanaan pengembangan ekowisata yang terdapat di wisata Balong Kawuk Dusun Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung. Riset ini dilakukan saat sebelum terdapatnya pandemic Covid 19 di Indonesia. Diamati dari bidang theories, dalam riset ini filosofi yang dipakai merupakan filosofi Edward III selaku grand filosofi ekowisata. Tata cara yang dipakai periset dalam riset ini memakai tata cara riset kualitatif deskriptif. Pangkal informasi pokok merupakan hasil dari tanya jawab serta dasar informasi merupakan berubpa file file akta. Metode analisa informasi memakai analisa informasi Miles serta Huberman.. Hasil dari riset ini merupakan ada sebagian hambatan semacam belum terdapatnya monitoring serta pula penilaian progam diklat oleh Biro Kultur serta pariwisata Kabupaten Tulungagung, jumlahnya perhitungan operasional yang sedang sedikit didalam pengembangan pariwisata wilayah yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Hendak begitu, dengan cara biasa aplikasi yang terjalin sudahlah lumayan bagus, serta direalisasikan dan diwujudkan dalam bentuk pengembangan pariwisata baik destinasi wisata maupun pendukung wisata yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

ABSTRACT

In this research study, the author focuses on three main aspects/elements that exist in the ecotourism development policy in Balong Kawuk Tourism, Sumberejo Kulon Village, Tulungagung Regency. This research was conducted as an implementation study before the Covid 19 pandemic in Indonesia. Viewed from a theoretical perspective, in this research the theory used is Edward III's theory as the grand theory of ecotourism. The method used by researchers in this research use descriptive qualitative research methods. Primary data sources are the results of interviews and secondary data sources are document files. The data analysis technique uses Miles and Huberman data analysis. The results of this research are that there are several obstacles such as the absence of monitoring and evaluation of training programs by the Tulungagung Regency Culture and Tourism Office, the operational budget is still small in developing regional tourism in the Regency. Tulungagung. However, in general the implementation that occurred was quite good, and was realized in the form of tourism development, both tourist destinations and existing tourism support.

Keywords: Implementation, Policy, Tourism Development

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata Destinasi Wisata Balong Kawuk di Dusun Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung emngacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataaan, yang berikutnya oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dipaparkan ke dalam Hukum No 50 Tahun 2011 mengenai Konsep sentral Pembangunan Kepariwisataaan Nasional, serta Perda No 50 Tahun 2012 mengenai RIPDA Kab. Tulungagung. Darmawisata Balong Kawuk terdapat di Dusun Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut. empat darmawisata ini tadinya cumalah berbentuk sungai yang dipadati banyak belukar buas alhasil nampak semacam rawa. Tempatnya yang rindang, membuat wilayah ini terkesan menakutkan. Buat mengganti pandangan itu hingga dibangunlah tempat darmawisata ini. Pembangunan Balong Kawuk dicoba dengan cara gotong royong antara warga dengan aparat proyek memakai anggaran dusun yang digulirkan penguasa. Dengan bermacam sarana yang sudah terdapat, nampak pementasan darmawisata yang terdapat belum diatur dengan bagus. Perihal itu efisien memunculkan kesedihan untuk warga ditengah kemajuan pariwisata di Kabupaten Tulungagug. Minimnya dukungan dari penguasa Kabupaten Tulungagung serta faktor- faktor lain semacam mutu SDM; keterbatasan perlengkapan penciptaan modern; serta sedikitnya alat infrastruktur pendukung pariwisata. Riset ini dibantu oleh sebagian riset terdahulu, antara lain Alikulova(2014) permasalahan cara aplikasi tourism local implementation dalam tingkatan perekonomian setempat di Kabupaten Tulungagung membutuhkan analisis serta kontrol yang berkelanjutan dan tidak berubah- ubah. Sehabis itu dari Dalonsoe .(2014) keberhasilan pengembangan pariwisata ada pada pengepakan pementasan melalui lapisan aktivitas yang menarik, serta dibutuhkan kesertaan peran para aktor stakeholder didalamnya, Mengenai ini Penguasa Kabupaten Tulungagung harus turut dan dalam metode pengembangan wisata itu. Penguasa Kabupaten Tulungagung butuh membuat kebijaksanaan yang bisa mengoptimalkan kemampuan darmawisata di wilayah pedesaan. Setelah itu dari Gadise .,(2022) Akibat pandangan ekonomi serta sosial warga berplatform ekowisata, Kabupaten Tulungagung selaku kriteria parawisata di Jawa Timur mempunyai partisipasi dalam pengembangan ekowisata wilayah. Bersumber pada kerangka berlakang diatas, tujuan dari riset ini merupakan menarangkan serta menganalisa aplikasi kebijaksanaan pengembangan ekowisata di Dusun Sumberejo Kulon dalam menggerakkan pemahaman masyarakatnya alhasil sanggup tingkatan angka ekonomi Dusun Sumberejo Kulon.

1. Kebijakan Publik

Kajian literatur aplikasi kebijaksanaan memakai pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III(1980). Pendekatan Edward III(1980) menekankan kalau kesuksesan aplikasi kebijaksanaan bisa diamati lewat 2 aspek penting, ialah aspek pendukung serta penghambat aplikasi. Setelah itu kedua aspek tersebut, Edward III(1984) menjabarkan jadi 4 aspek penting ialah: komunikasi; sumber energi; tindakan eksekutif(penguasa atau birokrasi); serta struktur institusi.

2. Implementasi Pengembangan Pariwisata

Sementara itu buat implementasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dalam tingkatan ekonomi wilayah merujuk pada sebagian referensi ialah, pertama, Alikulova(2014) menekankan kalau kesuksesan pengembangan pariwisata di Kazakhstan serta Turki ialah dengan cara evaluasi serta tidak berubah- ubah dalam koreksi alat infrastruktur atau prasarana, promosi wisata, dan koreksi mutu jasa dan butuh adanya pembuatan peraturan di tingkatan regional. Setelah itu dari Dalonsoe .,(2014) serta Agiomirgianakis .,(2017) menerangkan kalau kesuksesan pengembangan pariwisata terdapat pada kebijaksanaan terpaut pengepakan aktivitas serta keikutsertaan actor yang ikut serta dalam pembuatan ahli plan kebijaksanaan

pariwisata (Bulin, 2015). Setelah itu dari Hwang& Lee (2014) yang menekankan kalau kesuksesan pengembangan pariwisata berplatform ekowisata didaerah tidak bebas dari kebijaksanaan penguasa yang membela kepada area serta kemampuan yang dimiliki wilayah itu. Dan Anake ., (2022) menerangkan kalau pandangan sosial serta warga dan area mempunyai akibat serta akibat yang lumayan kontributif dalam pengembangan ekowisata berplatform warga, disamping itu pandangan sosial yang mencakup peninggalan adat serta kebiasaan lokal jadi aspek penting dalam melindungi ekosistem ekowisata dengan cara berkepanjangan.

3. Peningkatan Ekonomi Daerah

Sedangkan dari segi peningkatan ekonomi daerah, Oktavilai (2011); Andriyani e a ., (2012); dan Utama (2016) menegaskan bahwa keberadaan pariwisata di suatu daerah seperti di Jawa Tengah; Kepulauan Sikakap dan Bali, berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi daerah maupun masyarakat daerah tersebut. cenderung tidak efisien karena masing masing individu pada dasarnya memiliki insentif untuk menjadi penumpang atau free riders dari kerja individu yang lain dalam kelompok. Oleh karena itu Olson berpendapat bahwa hanya sebuah insentif yang selektif yang akan menstimuli seorang individu yang rasional di dalam kelompok yang tersembunyi untuk bertindak sesuai dengan orientasi pada kelompok tersebut. Olson selanjutnya mengemukakan konsep tentang interorganizational system yang menjelaskan bahwa free riders dapat dikurangi melalui efisiensi kelompok, sistem insentif dan kontrol terhadap akses barang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya adalah deskripsi kualitatif. Riset yang diartikan merupakan buat mengakulasi data status ataupun pertanda yang terdapat ialah kondisi bagi apa terdapatnya pada dikala riset dicoba. Dalam kondisi riset ini dengan cara khusus bermaksud buat melaksanakan analisa dengan mengenali dan melukiskan kemampuan darmawisata Kabupaten Tulungagung, spesialnya yang jadi fokus posisi dalam riset ini merupakan Destinasi Darmawisata Balong Kawuk Dusun Sumberjo Kulon. Ada pula penentuan posisi riset itu di kerangka belakangi kalau Darmawisata Balong Kawuk ialah area cagak area pariwisata favorit di Dusun sekelilingnya. Tidak hanya itu, di Dusun Sumberjo Kulon pula ada kemampuan kemampuan pariwisata yang lumayan bagus serta bila terkelola dengan maksimum hendak berikan akibat positif untuk warga dekat. Kemudian, Desa Sumberejo Kulon juga merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Tulungagung yang terikat ruang dan waktu dalam pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat maupun pembangunan kepariwisataan secara terpadu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer berasal dari informan yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni Bapak Sandra selaku Kepala Bidang Penyusunan Program, Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk, Kepala Desa Sumberejo Kulon, Ketua Pokdarwis desa Sumberjo, serta masyarakat yang aktif dalam komunitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, baik laki- laki maupun perempuan. Sumber data sekunder menggunakan dokumen (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2026, Renstra Disbudpar Kabupaten Tulungagung, dokumen

Pokdarwis Desa meliputi data kunjungan pariwisata. Data analisis menggunakan model analisis Miles, Huberman dan Sa'dana (2014) meliputi condensation, dalam konteks penelitian ini, kondensasi data dilaksanakan dengan melakukan fokus penelitian berdasarkan pada 3 rumusan masalah yang ditentukan yakni implementasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung; dampak implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Display data dalam konteks penelitian ini dilakukan melalui kutipan hasil wawancara, dokumentasi dan foto; drawing, verification and Conclusion guna menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan faktor pendukung serta faktor penghambat baik pada kondisi internal maupun eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Tulungagung

A. Komunikasi

Pengembangan serta pengurusan pariwisata di darmawisata Balong Kawuk Dusun Sumberejo Kulon di mengurus dengan cara mandiri oleh masyarakat setempat. Bentuk development of tourism policy yang dicoba Kabupaten Tulungagung merupakan lewat development approach berplatform masyarakat lokal, ialah dengan mengaitkan langsung masyarakat setempat dalam tiap aktivitas pariwisata, semacam pementasan serta pengurusan. Biro Kultur serta Pariwisata berlaku seperti leading sector pada cara tourism destination development senantiasa melaksanakan komunikasi 2 arah dengan Dusun atau Kelurahan yang jadi obbjek pengembangan darmawisata. Komunikasi 2 arah dimaksudkan supaya terangkai situasi yang berkelanjutan serta mendukung. Dan terwujudnya kesepadanan dalam cara aplikasi kebijaksanaan. Ada pula cerita ini berawal dari tanya jawab Kasungram Biro Pariwisata Kabupaten Tulungagung selaku selanjutnya: "disetiap destinasi kita senantiasa terkoneksi dengan itu namanya Pokdarwis selaku representasi kita dilapangan, kita membujuk mereka bertukar pikiran rasanya apa yang sedang jadi hambatan di tempat itu, kita tolong buat menyediakan, sebisa kita, betul jika Darmawisata Baong Kawuk Dusun Sumberjo Kulon umumnya usulannya dari komunitas dahulu, komunitas menganjurkan ataupun mengajukan ide, kita amati proposalnya terlebih dulu, semacam kemarin terdapat pengajuan lewat ide terpaut pembangunan failitas pendukung darmawisata, itu kita fasilitasi. Jadi intinya komunikasi ialah alat agen harapan kita pada warga, supaya kita ketahui perkara apa yang mereka hadapi di situ terpaut pengembangan destinasi darmawisata".(tanya jawab bertepatan pada 14 Agustus 2022, di kantor Biro Pariwisata Kabupaten Tulungagung). Wujud komunikasi antara Biro Kultur serta Pariwisata dengan pengelola darmawisata balong kawuk dicoba dengan cara face to face ataupun pertemuan tertata. Dalam acara tersebut, penduduk lokal diberikan hak untuk memberikan pendapat/aspirasi terkait permasalahan yang ada di Desa Sumberejo Kulon. Adapun deskripsi ini sesuai dengan Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai berikut: "Komunikasi yang kami lakukan selaku Dinas kepada Pemerintah Kelurahan senantiasa berjalan dengan baik, selain itu kami juga membuka ruang kepada masyarakat khususnya Pokdarwis setempat untuk menyuarakan aspirasinya kepada kami, agar kami mengetahui kendala apa saja yang menjadi perhatian mereka." (wawancara 26 Agustus 2022 di Dinas Pariwisata). Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga rutin berbincang dengan Pokdarwis Desa Sumberjo Kulon terkait sosialisasi secara inklusif terkait implementasi kebijakan, berupa pemahaman terkait arti penting menjaga dan melestarikan potensi pariwisatanya. Terkait adanya komunikasi antar aktor dalam pengembangan wisata di Desa Sumberjo Kulon merupakan suatu hal yang penting terjadi, karena keterlibatan aktor yang terlibat dalam pembuatan master plan kebijakan pariwisata merupakan langkah awal

menuju keberhasilan pengembangan pariwisata (Dalonso *et al.*, 2014; Bulin, 2015 dan Agiomirgianakis, 2017). Selain itu keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan ekowisata merupakan syarat dari keberadaan ekowisata di suatu daerah (Murianto serta Masyudi, 2021; dan Sari, 2021).

B. Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana, dan Kewenangan

Sumberdaya pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Desa Sumberjo Kulon bisa dikatakan belum ideal, karena sebagian pegawai merupakan lulusan SMA sederajat. Seturut itu, sebagian pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memiliki keahlian di bidang pariwisata. Tentunya hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat setiap tugas yang dilaksanakan. Maka dari itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan desa Sumberjo Kulon, yaitu dengan mendatangkan para ahli dibidang pariwisata untuk memberikan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan potensi wisata dan mendorong UMKM di daerah tersebut. Adapun deskripsi ini berasal dari wawancara oleh Bapak Candra Kurniawan selaku Kasungram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung bahwa “Jika dinilai dari segi keadaan yang dilapangan ketersediaan pegawai, Dinas kita ini ya masih dibilang kekurangan ya, terlebih pegawai dan staf kita sebagian besar masih lulusan S1 dan ada juga yang berstatus lulusan SMA, ini juga menjadi masalah bagi kita tentunya dalam melaksanakan tugas dan kebijakan terkait pengembangan pariwisata di daerah”. (wawancara 20 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata) Sedangkan dari sisi sumber daya anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dirasa sudah mencukupi karena anggaran berasal dari APBD dan sudah di distribusikan ke masing-masing pos. Sedangkan sumberdaya anggaran di Wisata Balong Kawuk Desa Sumberjo Kulon bersumber dari APBD dan dana swadaya masyarakat belum ada bantuan dari pihak pemerintah, terutama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Adapun deskripsi ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sandra selaku kasungram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: “semua anggaran yang tersedia di Dinas ini sudah disesuaikan dengan posnya masing-masing, jadi secara umum pengendalian anggaran di atur oleh bidang-bidang yang menerimanya. Dan semua itu ada pertanggungjawabannya dan dilaporkan dalam laporan tahunan yang diaudit secara berjenjang.”

C. Struktur Birokrasi

Secara struktur birokrasi, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya untuk memaksimalkan kinerja instansinya. Struktur birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang pariwisata, kebudayaan, dan pemasaran, yang memiliki tupoksi dan tugas yang berbeda-beda sesuai beban kerja bidang tersebut. Kemudian pada tingkat kecamatan diwakili oleh Kecamatan ngunut. Sedangkan pada tingkat paling bawah diwakili oleh pemerintah Desa Sumberjo Kulon yang bertindak sebagai pembina serta mitra pokdarwis di tingkat desa.

D. Disposisi

Salah satu bentuk disposisi yang dilakukan pihak pemerintah kepada Desa Sumberjo Kulon adalah meningkatkan mutu SDM para aktor wisata di Desa Sumberjo Kulon. Peningkatan mutu ini dilakukan melalui pembinaan pokdarwis setempat, yang merupakan pelaku usaha di desa Sumberjo Kulon. Selain itu, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga tidak segan untuk mengkomunikasikan dua arah serta pembinaan kepada pelaku usaha di

Zulfaisya Nurhalimah¹, Satria Iman Yanottama²

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

(Studi pada Destinasi Wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung)

desa Sumberjo Kulon. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kasungram Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut: Terkait pembinaan pokdarwis kami selalu mengusahakan untuk terus berkomunikasi, dengan mereka,

kita juga sering undang ke Dinas untuk berkomunikasi secara langsung. Bagaimana perkembangan dari setiap wilayahnya masing-masing, terkadang kita yang langsung terjun ke sana untuk melakukan tinjau lapang. Selain itu Dinas Pariwisata secara berkala mengagendakan pembinaan melalui program program pelatihan yang telah kami tampung berdasarkan kebutuhan dari usulan masing-masing wilayah. Intinya pembinaan terhadap Pokdarwis kita selalu lakukan”. (wawancara 14 Agustus 2020 di Dinas Pariwisata). Data yang diperoleh Sejalan dengan pendapat Dalonso *e a .*, (2014) dan Agiomirgianakis *e a .*, (2017) keterlibatan aktor yang terlibat dalam pembuatan master plan kebijakan pariwisata.

2. Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Tulungagung

a. Menaikkan Nilai Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat dampak pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama bagi penduduk setempat. Walaupun demikian, peningkatan ekonomi tidak signifikan dirasakan oleh pengusaha wisata di Desa Sumberjo Kulon, tetapi demikian, kehadiran pariwisata bagi masyarakat sekitar wisata Balong kawuk membawa peningkatan perekonomian mereka. Peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumberjo Kulon didapatkan melalui beberapa upaya dan agenda pariwisata yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, seperti kegiatan event pariwisata. Seperti pendapat Dalonso *e a .*, (2014) dan Agiomirgianakis *e a .*, (2017) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata terletak pada kebijakan terkait pengemasan kegiatan dan keterlibatan aktor. Kemudian dari Hwang & Lee (2014) yang menekankan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata didaerah tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang pro terhadap lingkungan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sektor ini ada seiring dengan perkembangan wisata di Desa Sumberjo Kulon. Pengembangan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di desa sumberjo kulon, membawa penduduk setempat untuk membuka industri baru seperti sektor homestay serta produk- produk khas daerah tersebut. Adapun industri yang terbentuk di antaranya kerajinan anyaman bambu, berbagai macam olah keripik, dan produk kopi. Berdasar hasil penelitian, kemunculan industri kecil dan menengah sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian bagi penduduk setempat. Selain itu, dengan adanya atraksi wisata di Desa Sumberjo Kulon berdampak pada penurunan angka pengangguran. Tetapi beberapa penduduk setempat juga tidak merasakan peningkatan perekonomian dengan alasan kualitas SDM mereka yang mumpuni.

KESIMPULAN

Aplikasi Kebijaksanaan Pembangunan Kepariwisataan Di Kabupaten Tulungagung, Penanda komunikasi menarangkan kalau Pemkab Tulungagung sudah melaksanakan cara komunikasi dampingi pelaku pokdarwis dengan hasil melegakan. Hendak namun penerapan komunikasi butuh ditingkatkan lagi dengan aplikasi optimalisasi yang bagus. Dalam penanda sumberdaya, sedang ada hambatan disisi SDM serta bujet, tetapi begitu pada pandangan yang lain semacam wewenang serta alat infrastruktur telah cocok serta mensupport kesuksesan program ini. Penanda Bentuk Birokrasi, telah terangkai dengan bagus dengan terdapatnya bebepa bintang film yang ikut serta. Koodinasi atau bimbingan

dampingi bintang film dalam pengembangan penjualan pariwisata ini bertabiat fleksibel serta 2 arah Penanda Catatan, ialah terdapatnya dukungan dari pemimpin Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan darmawisata di Balongkawuk lewat sebagian aktivitas. Namun dalam pandangan ini sedang ada halangan berbentuk aktivitas pengawasan yang belum terselenggara. Serta, beberapa kegiatan seperti pelatihan belum optimal. Hasil dari penmelitian ditunjukkan dengan kemakmuran penduduk setempat meningkat, hal ini dapat dilihat dari angka kemakmuran yang meningkat. Munculnya usaha-usaha industri di sekitar pariwisata dan dikelola langsung oleh warga setempat, sehingga hal ini mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Faktor yang mempengaruhi baik itu yang mendukung dan penghambat dalam penelitian tersebut. Kausa Pendukung: dukungan regulasi dan komitmen oleh Pemkab Tulungagung. Kausa penghambat: yakni Keterbatasan SDM pegawai Pemkab dan penduduk setempat dan ketersediaan anggaran dalam proses implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiomirgianakis, G., Serenis, D., & Tsounis, N. (2017). Effective timing of tourism policy: The Case of Singapore. *Elsavier, Economic Modelling*, 60, 29-38.
- Alikulova, A. (2014). Tourism Impact on Improvement of Population Welfare in Kazakhstan. *Actual Problems of Economics Journal*, 155, 190-200.
- Andriyani, I., Husnita, L., & Hardi, E. (2012). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Bahari di Kepulauan Sikakap, Kabupaten Mentawai. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(2), 95-101.
- Policies and Strategies for tourism development – Some Lessons for Romania. *Faculty of Finance, Banking and Accountancy Bucharest Journal*, 7(2), 77-81.
- Hwang, J. H., & Lee, S. (2014). The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea. *Tourism Management, Elsevier*, 46, 501-513.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Lasaiba, M. A. (2022). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 15(2), 1-7.
- Miles, M. B., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd Edition. Sage Publications, Inc.
- Murianto & Masyhudi, L. (2021). Identifikasi Potensi Pengembangan Ekowisata Desa Karang Sidemen Untuk Mendukung Berkelanjutan di Lingkar Geopark, Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10(1), 79-86.
- Putri, E. D., Yulianto, A., Wardani, D. M., & Saputro, L. E. (2022). Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Terhadap Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 27(3), 317-327.
- Sari, A. P., Agus, I. P., Mahendra, A., Wade, Y. R., & Nasional, U. P. (2021). Strategi Penghijauan Desa Sesandan Menuju Desa Ekowisata. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110-113.
- Utama, M. S. (2016). Pengaruh perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. PhD Tesis. Universitas Airlangga.